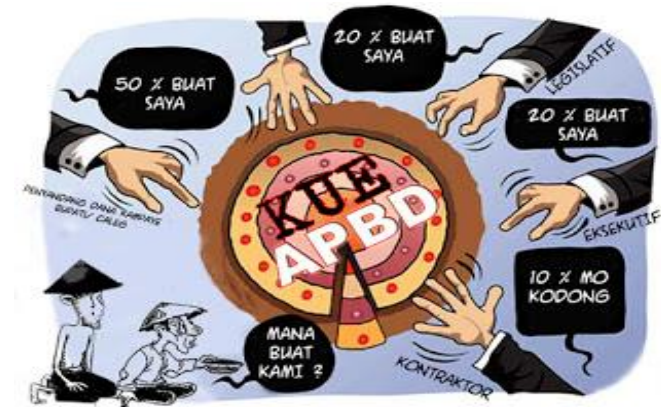
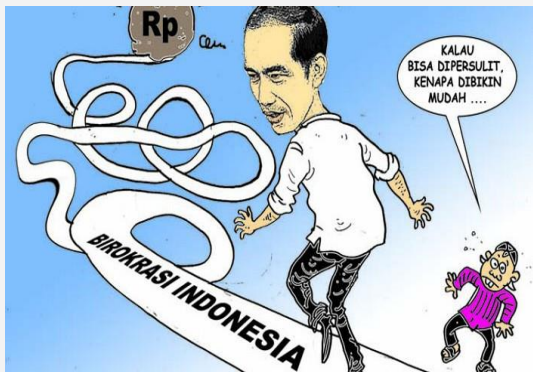


“Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkumham RI”

Jakarta, 1 Maret 2019

Patologi Birokrasi



Tuntutan Masyarakat terhadap
Birokrasi semakin tinggi



1

Ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2

Perilaku koruptif para penyelenggara birokrasi

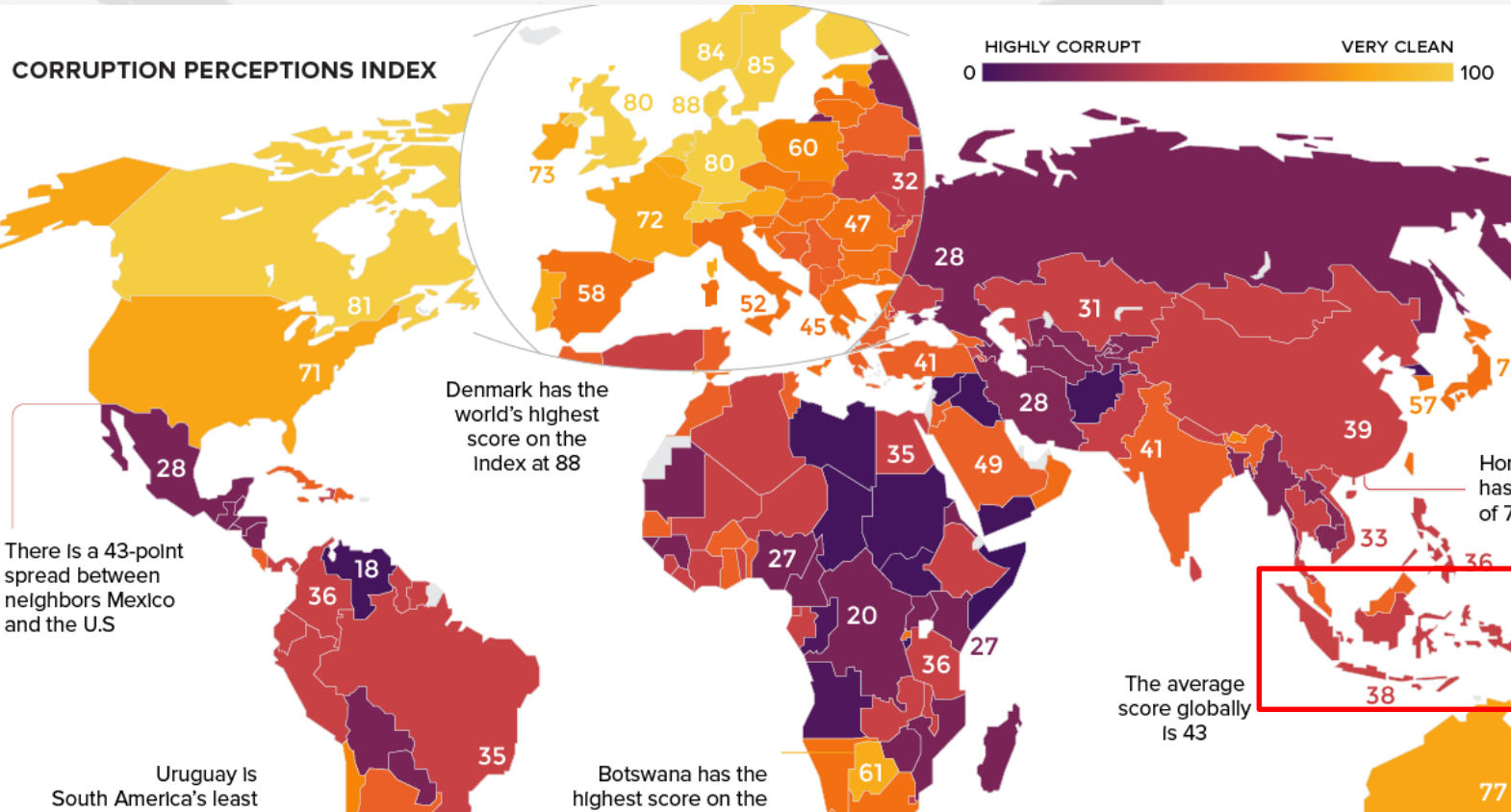
3

Pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan

Indeks Persepsi Korupsi



Staf Ahli
Kementerian Hukum dan HAM RI



38

Indeks Persepsi Korupsi
Tahun 2018

89

Peringkat Indonesia dalam
Daftar Negara yang Bersih dari
Korupsi

Arti Penting Birokrasi



Staf Ahli
Kementerian Hukum dan HAM RI



Birokrasi adalah mesin yang akan menentukan cepat atau lambatnya pembangunan suatu negara. Birokrasi yang adaptif, responsif, dan berkapasitas tinggi akan membawa bangsanya pada pembangunan yang cepat dan nyata

DYNAMIC GOVERNANCE

PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY

RULE BASED
BUREAUCRACY

2025

2019

2014

- efektif, efisien dan ekonomis
- difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil)
- menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik
- Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasi

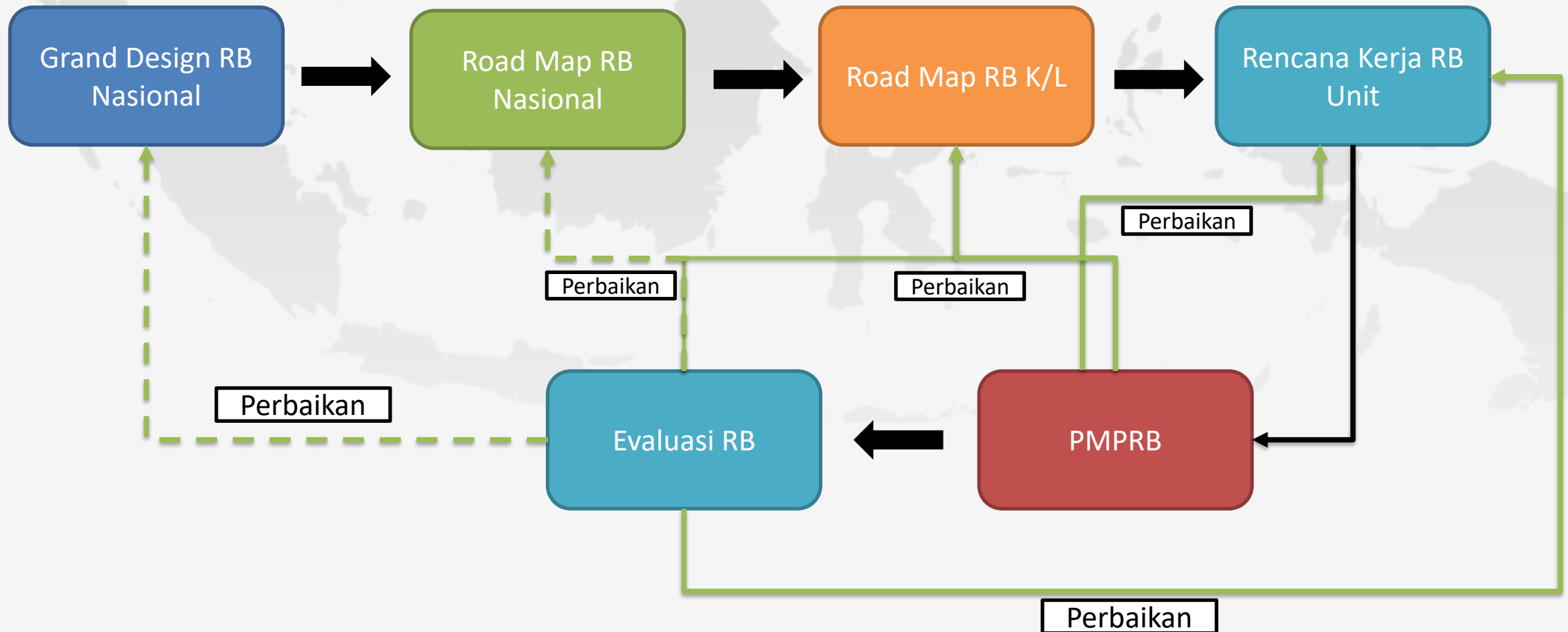
**Grand Design Reformasi
Birokrasi Nasional
2010 - 2025**

Perpres No. 81 Th. 2010

Logika Proses RB



Staf Ahli
Kementerian Hukum dan HAM RI





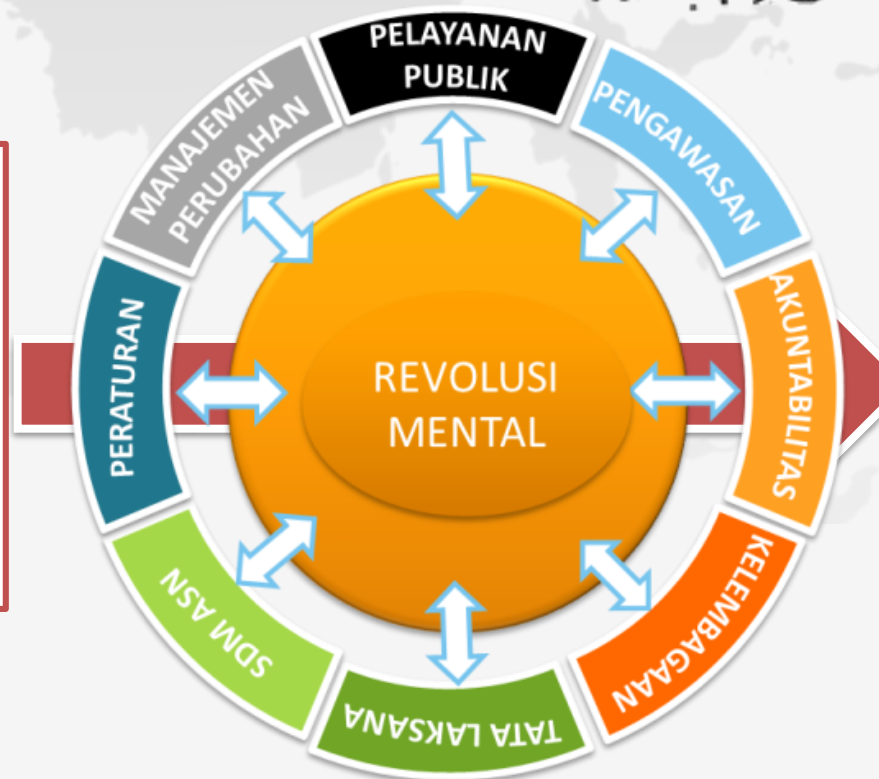
Pemerintah belum bersih,
kurang akuntabel dan
berkinerja rendah



Pemerintah belum efektif
dan efisien



Pelayanan publik masih buruk



Pemerintah yang bersih,
akuntabel, dan berkinerja tinggi



Pemerintah yang efektif dan
efisien



Pelayanan publik yang baik dan
berkualitas





Pelayanan Publik



Peraturan Perundang-Undangan



SDM Aparatur Sipil Negara



Tata Laksana



Mental Aparatur



Pengawasan

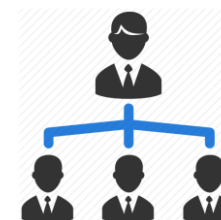


Akuntabilitas



Accountability

Kelembagaan



2016

Indeks RB
75,67 (BB)

2017

Indeks RB
76,33 (BB)

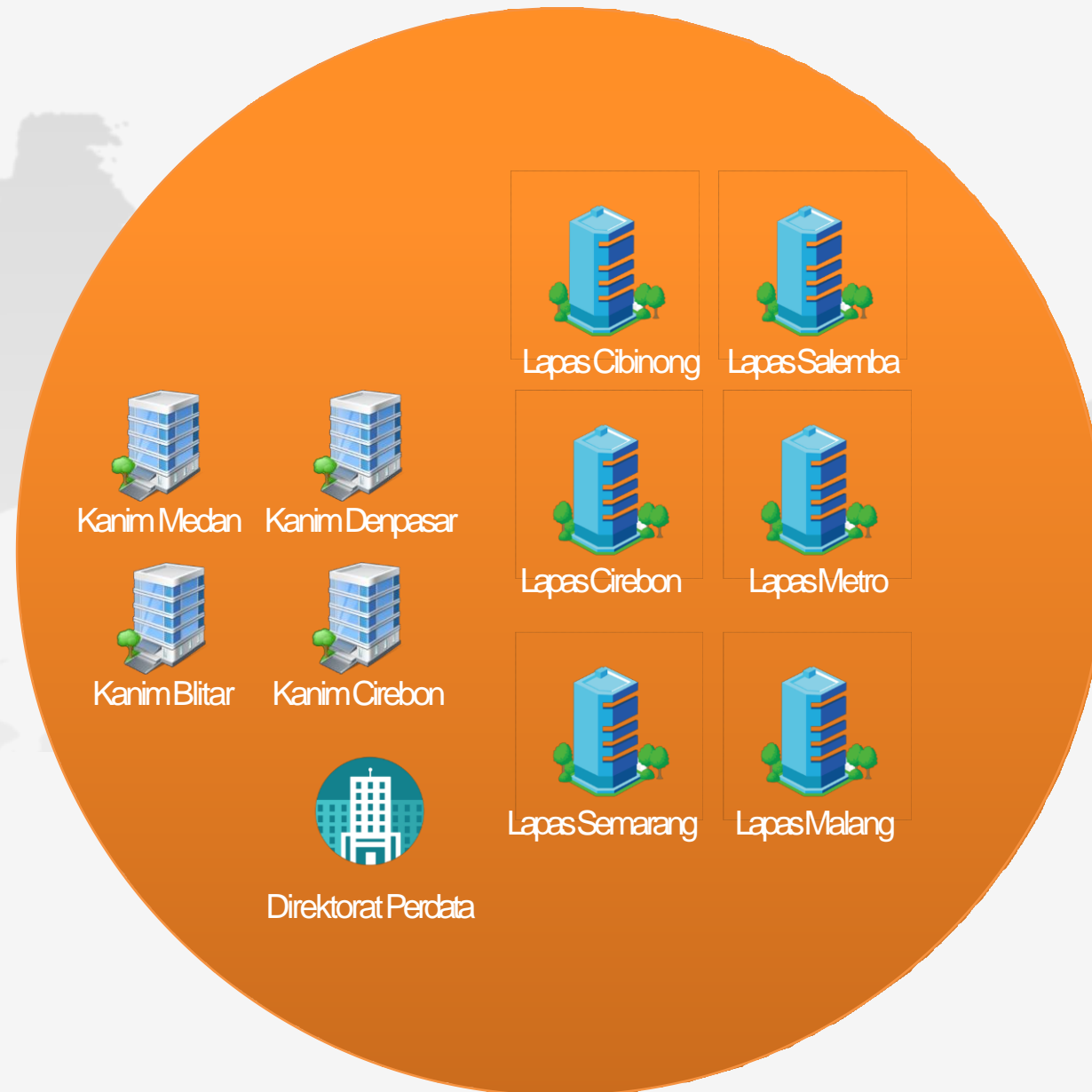




Reformasi Birokrasi



Zona Integritas 1080 SATKER Kemenkumham



PMPRB

a. Area Perubahan PMPRB:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Komponen Hasil:

1. Pemerintahan Akuntabel, bersih dan Bebas KKN
2. Pemerintahan yang Efektif dan Efisien
3. Pelayanan Publik yang Berkualitas

c. Lokus : Kementerian

d. Assessor dan Evaluator

e. Menghasilkan Indeks RB

WBK/WBBM

a. Area Perubahan PMPRB:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

b. Komponen Hasil:

1. Pemerintahan Akuntabel, bersih dan Bebas KKN
2. Pelayanan Publik yang Berkualitas

c. Lokus : Satuan Kerja/Unit Kerja

d. Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Nasional (TPN)

e. Menghasilkan Satker berpredikat WBK atau WBBM



Tujuan PMPRB



Staf Ahli
Kementerian Hukum dan HAM RI

1

Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham

2

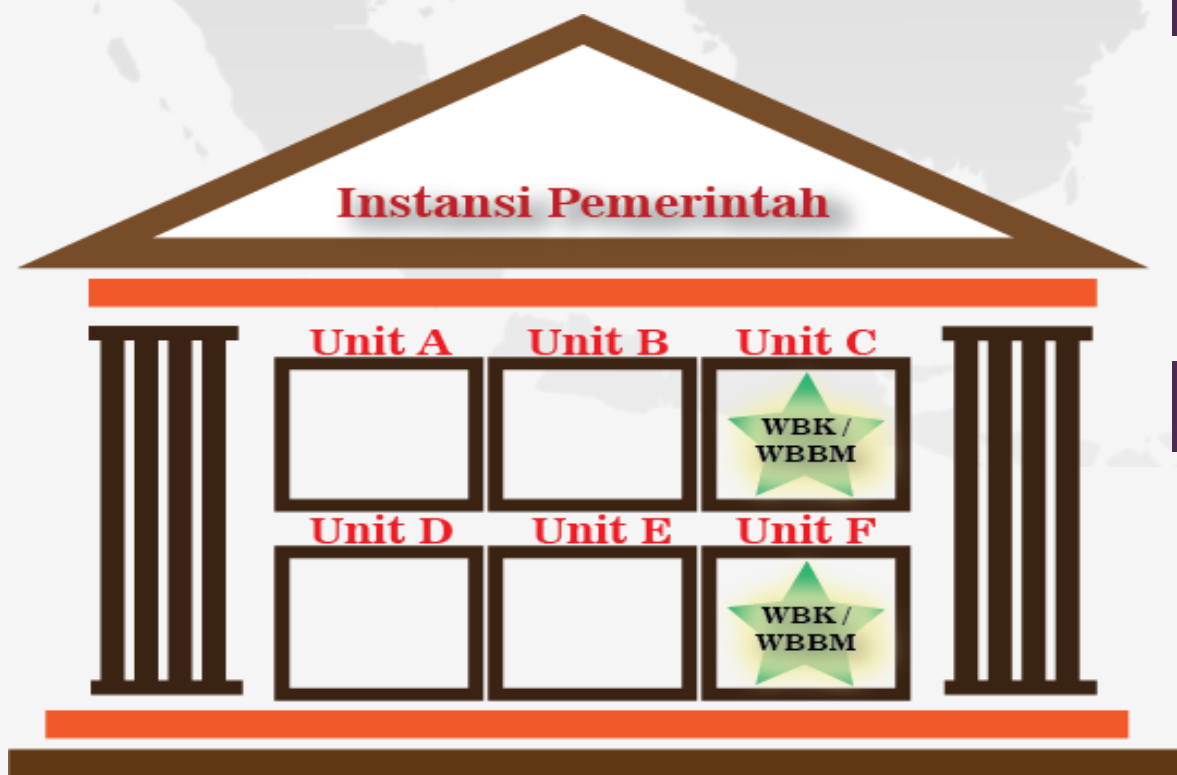
Menggambarkan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkumham

3

Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri dari periode sebelumnya



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan **WBK/WBBM** melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal **pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik**

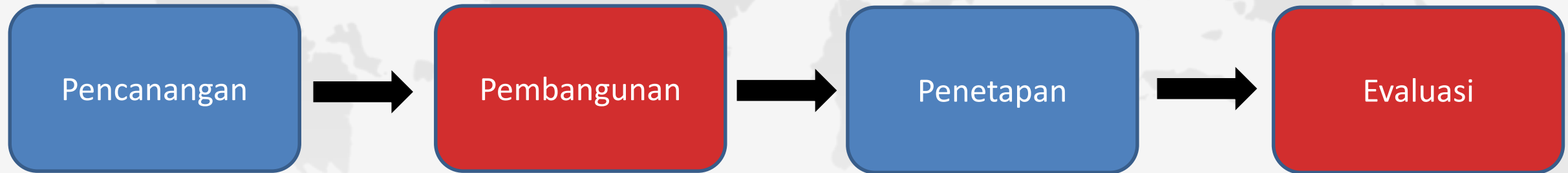


1 Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja

2 Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan **penguatan kualitas pelayanan publik.**



Proses Pembangunan ZI



Staf Ahli
Kementerian Hukum dan HAM RI



Daftar Satker WBK s.d. 2018



Staf Ahli

Kementerian Hukum dan HAM RI



1

Direktorat Perdata AHU

2

Lapas Perempuan Kelas IIA
Malang

3

Lapas Kelas IIA Metro

4

Lapas Kelas IIA Cibinong

5

Lapas Kelas IIA Salemba

11

Lapas Perempuan Kelas II
Semarang

6

Rutan Kelas I Cirebon

7

Kanim Kelas II Blitar

8

Kanim Kelas I Khusus Medan

9

Kanim Kelas I Denpasar

10

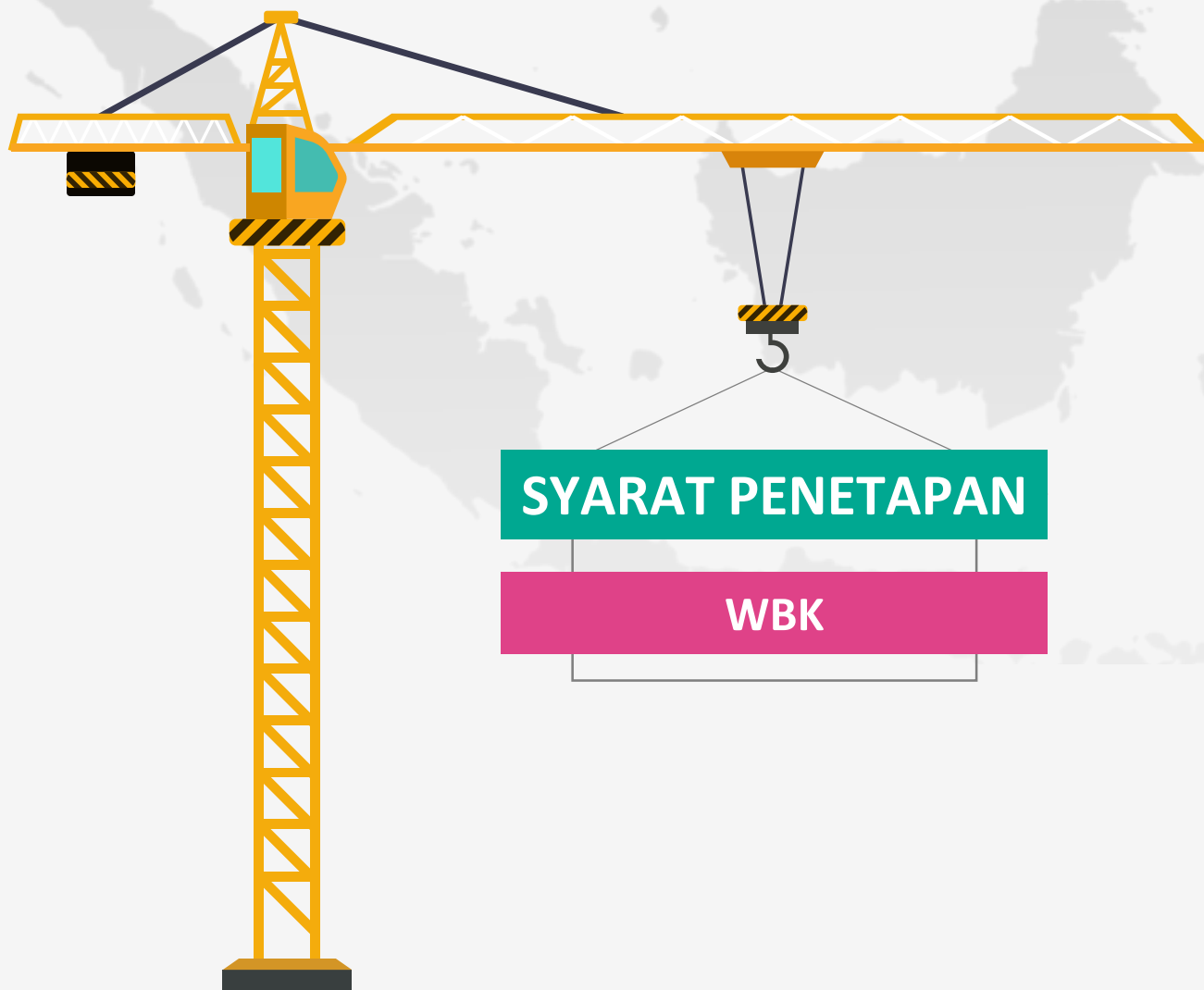
Kanim Kelas II Cirebon

Syarat Penetapan WBK



Staf Ahli

Kementerian Hukum dan HAM RI



Level Instansi (**Kementerian Hukum dan HAM RI**)

1. Mendapat predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan;
2. Mendapatkan nilai AKIP minimal "CC"

Level unit kerja (**Tingkat Satker**)

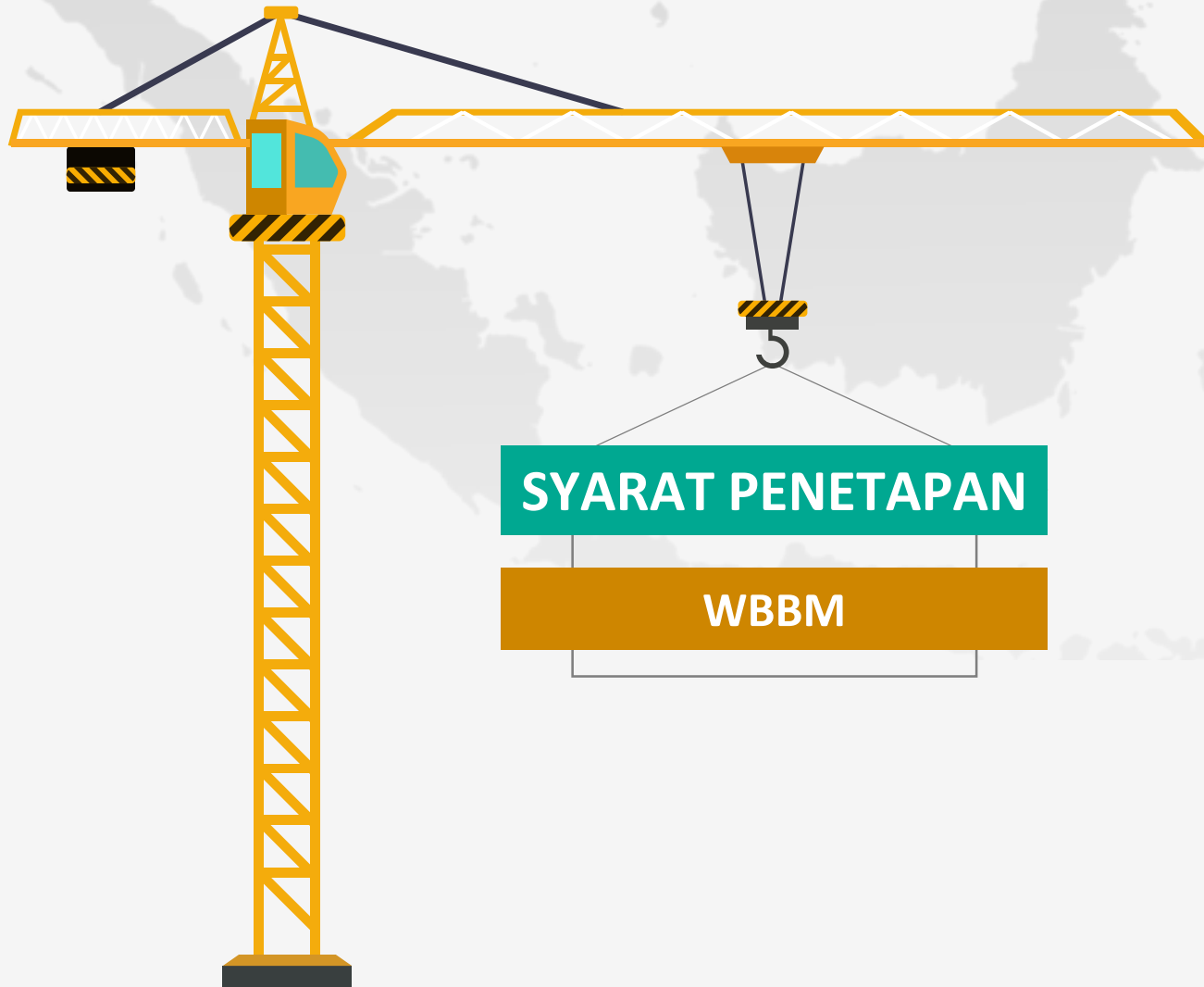
1. Setingkat eselon I s/d eselon III;
2. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
3. Dianggap telah melaksanakan program reformasi birokrasi secara baik
4. Mengelola sumber daya yang cukup besar

Syarat Penetapan WBBM



Staf Ahli

Kementerian Hukum dan HAM RI



Level Instansi (**Kementerian Hukum dan HAM RI**)

1. Mendapat predikat WTP dari BPK atas opini laporan keuangan selama minimal 2 tahun berturut-turut;
2. Mendapatkan nilai AKIP minimal “CC”

Level unit kerja (**Tingkat Satker**)

1. Pada level Satker yang diusulkan merupakan Satker yang sebelumnya **telah mendapatkan predikat WBK**.

WBK

Komponen Hasil

1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

- Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

2. Kualitas Pelayanan Publik

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Syarat Nilai Kelulusan WBK

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal **75**
2. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” **minimal 18**, dengan nilai:
 - a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi **minimal 13,5**
 - b. sub komponen Persentasi TLHP **minimal 4,5**

WBBM

Komponen Hasil

1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN

- Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)
- Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti

2. Kualitas Pelayanan Publik

- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)

Syarat Nilai Kelulusan WBBM

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal **85**
2. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” **minimal 18**, dengan nilai:
 - a. sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi **minimal 13,5**
 - b. sub komponen Persentasi TLHP **minimal 4,5**
3. Nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” **minimal 16**

Reward Penerima WBK/WBBM



Staf Ahli
Kementerian Hukum dan HAM RI



Promosi Jabatan



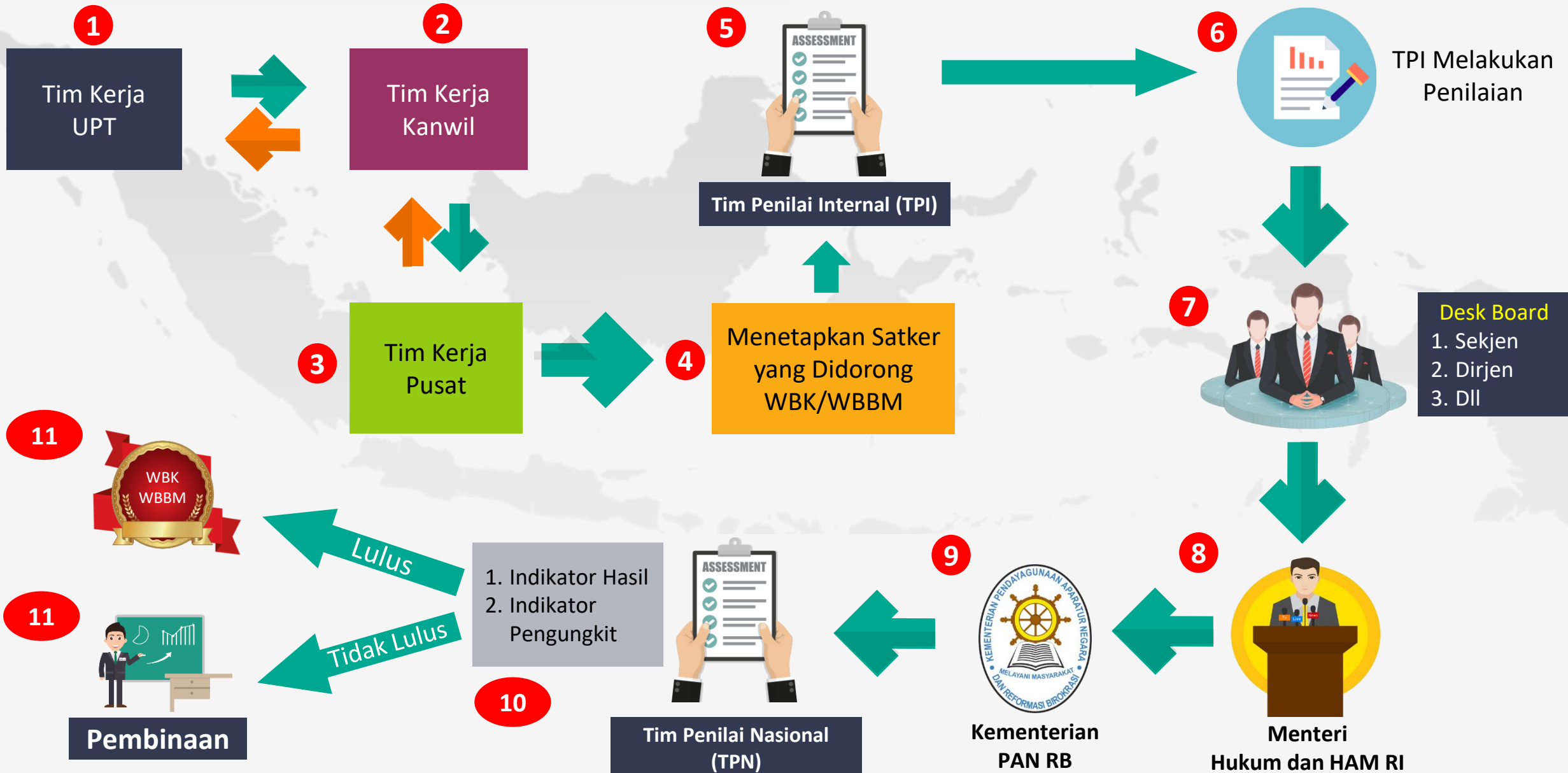
Kenaikan Tunjangan
Kinerja

MENANTI!

Alur Pembangunan WBK/WBBM



Staf Ahli
Kementerian Hukum dan HAM RI



FEBRUARI

1. Pendampingan calon satker WBK WBBM oleh tim pusat
2. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi) calon satker WBK WBBM oleh tim Kanwil

APRIL

Pelaksanaan Penilaian calon satker WBK WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM oleh TPI

JUNI

Penyusunan surat Menteri Hukum dan HAM perihal usulan Satker WBK WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM kepada Kemenpan RB

01

02

03

04

05

06

JANUARI

1. Rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WWBM, Penetapan Calon Satuan Kerja WBK/WBBM, Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
2. Pendampingan calon satker WBK/WBBM
3. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi)
4. Kanwil membentuk tim kerja wbk wbbm
5. Masing-masing Satker mengajukan daftar tim kerja wbk wbbm ke Kanwil
6. Kanwil melakukan assesment dan mengusulkan daftar tim kerja wbk wbbm satker kepada Irjen

MARET

1. Pendampingan calon satker WBK WBBM oleh tim pusat
2. Sosialisasi dan Penguatan (Internalisasi) calon satker WBK WBBM oleh tim Kanwil

MEI

1. Pelaksanaan Penilaian calon satker WBK WBBM oleh TPI
2. Rapat panel oleh tim TPI untuk menetapkan penilaian akhir Satker WBK WBBM
3. Penyerahan laporan hasil penilaian TPI kepada Sekjen

AGUSTUS

1. Penguatan kembali satuan kerja berpredikat WBK/WBBM yang diusulkan kepada Kementerian PAN RB oleh Tim Kerja Pusat
2. Penilaian Kementerian PAN RB terhadap komponen hasil

OKTOBER

Penilaian Kementerian PAN RB terhadap Penilaian Pengungkit

DESEMBER

Penyerahan penghargaan Satuan Kerja berpredikat wbk wbbm

JULI

Koordinasi Kementerian Hukum dan HAM cq Biro Perencanaan dengan Kementerian PAN RB

SEPTEMBER

Penilaian Kementerian PAN RB terhadap komponen hasil

NOVEMBER

Penyampaian hasil penilaian Kementerian PAN RB

07

08

09

10

11

12

TAKE A RISK
MAKE A MISTAKE
LEARN SOMETHING NEW

3YESHA

THANK YOU 😊

